

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2), atau yang sering disebut Virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentase klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan hingga berat, bahkan sampai kematian.

Kasus *Corona Virus Disease (Covid-19)* menimbulkan berbagai kekhawatiran khususnya dari masyarakat. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2021, telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian.¹

Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di Kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi Covid-19 tercatat. Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan, China yang mewabah di seluruh dunia, sehingga membawa implikasi lumpuhnya semua sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat dunia, Kekhawatiran masyarakat semakin menjadi ketika lonjakan angka Covid-19 semakin tinggi.²

¹ Adityo Susilo et al., 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45.

² *Ibid*

Berdasarkan WHO, Covid-19 sampai saat ini telah tersebar lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Pemerintah telah mengklasifikasikan Covid-19 sebagai sebuah bencana nasional pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12/2020. Keputusan ini mengakui penyebaran Covid-19 sebagai bencana non-alam dan menugaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengkoordinasikan penanganannya, berdasarkan Keputusan Presiden No. 7/2020 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 9/2020. Kerjasama antara berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ditekankan dalam dokumen ini untuk memperkuat usaha penanganan pandemi. Keputusan ini juga menginstruksikan para pemimpin daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, untuk menyesuaikan kebijakan lokal dengan arahan dari Pemerintah Pusat dalam upaya bersama melawan Covid-19, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam bagian kedua dan ketiga dari keputusan tersebut.³

Melalui deklarasi situasi darurat kesehatan masyarakat non-alam oleh Pemerintah Indonesia, diakui bahwa COVID-19 merupakan jenis penyakit yang memicu keadaan darurat kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan satuan kerja tanggap Covid-19 per 20 November 2020, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 410.552 orang. Diperkirakan antara 3.000 dan 4.000 pasien

³ [KEPPRES No. 9 Tahun 2020 \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/keppres/keppres-no-9-tahun-2020)

tambahan di berbagai wilayah di Indonesia akan dinyatakan positif COVID-19 setiap harinya.⁴

Pada tahun 2020 di Indonesia Covid-19 bertambah hingga menembus 170.000 jiwa, penambahannya kasus ini didominasi oleh daerah DKI Jakarta sebanyak 3.308 dengan presentase sebesar 25,4% dari Covid-19 Nasional, diikuti dengan daerah lain Jawa Timur dengan penambahan yang masih tinggi 641 orang sehingga totalnya 32.754 orang dengan presentase sebesar 11,9%, dan Jawa Barat penambahan kasus 287 orang sehingga totalnya 10.815 orang dengan presentase sebesar 9,6%.⁵

Tingginya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi penyumbang terbanyak atas kasus konfirmasi positif Covid 19 di Indonesia. Menyikapi banyaknya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Gubernur tersebut mengatur: (Perlindungan kesehatan individu, Perlindungan kesehatan masyarakat, PSSB, PSSB pada Masa Transisi, Penyelidikan epidemiologi, Surveilans epidemiologi informatika, Penyebaran

⁴ Varian baru yang lebih menular perlu diwaspadai, Covid dapat mencapai 400.000 kasus di Indonesia - BBC News Indonesia

⁵ Rahajeng Kusumo, *Kasus Covid Baru RI Pecah Rekor! DKI, Jatim & Jabar Terbanyak*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200829164258-4-182997/kasus-covid-baru-ri-pecah-rekor-dki-jatim-jabar-terbanyak>

informasi, kemitraan dan kolaborasi, Upaya pemulihan ekonomi dan Upaya perlindungan sosial).

Upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani Covid-19 melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, nyatanya tidak cukup untuk mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Jumlah kasus Covid-19 meningkat setiap tahunnya antara tahun 2020 hingga 2021. Wilayah Jakarta Timur, khususnya Kecamatan Kramat Jati, Cawang, menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Berdasarkan data di kecamatan ini, kasus positif sebanyak 34 kasus, perawatan 2 kasus, isolasi mandiri 5 kasus, kesembuhan 26 kasus, dan kematian 1 kasus.⁶

Pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan serta regulasi untuk mengatasi situasi tersebut. Hal ini termasuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, telah diterbitkan beberapa peraturan penting untuk menangani dampak pandemi tersebut, termasuk:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi ini berkaitan dengan kebijakan keuangan negara serta upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai respons terhadap pandemi

⁶ Seorang Warga yang Terpapar Covid-19 di Cawang Meninggal Dunia Saat Isoman (jpnn.com)

COVID-19, serta menghadapi potensi ancaman terhadap ekonomi nasional dan stabilitas keuangan.

2. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang juga menargetkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 dan ancaman terhadap ekonomi nasional serta stabilitas sistem keuangan.
3. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi percepatan penanganan COVID-19.
4. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, yang menyediakan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.
5. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2020, yang mengatur pelaksanaan PSBB untuk mempercepat penanganan COVID-19.
6. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020, yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman dari COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.
7. Pengesahan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2021, yang merupakan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja.

Itu adalah beberapa contoh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus, melindungi masyarakat, dan mengelola dampak ekonomi dari pandemi.

Kelurahan Cawang terletak di bagian utara Kecamatan Kramat Jati, menjadi salah satu kelurahan dalam wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2021, populasi di Kelurahan Cawang mencapai 411.758 orang. Kelurahan ini membentang pada area seluas 179.04 hektar, yang secara administratif dibagi menjadi 12 wilayah Rukun Warga (RW) dan 117 wilayah Rukun Tetangga (RT). Selama tahun 2021, tercatat ada 82 individu di kelurahan ini yang dinyatakan positif mengidap Covid-19.

Covid-19 merupakan bencana non-alam yang di sebabkan oleh sebuah penyakit yang mengakibatkan kematian maka pemerintah selaku penyelenggara negara perlu melahirkan kebijakan publik serta menerapkan untuk menangani masalah ini. Adapun alasan peneliti memilih kelurahan Cawang karena untuk menganalisa implementasi kebijakan penanggulangan covid-19 dalam beberapa tahapan pencegahan, penanganan.

Dengan demikian dari 10 kelurahan yang ada di Jakarta Timur, peneliti memilih Kelurahan Cawang untuk di analisa *Pertama* karena cawang adalah wilayah yang strategis yang berbatasan dengan bogor dengan Bekasi. *Kedua* karena di cawang banyak lembaga-lembaga strategis seperti Universitas-Universitas,

Lembaga pertahanan, Kantor atau Instansi tempat kerja, (kodam) Komando Daerah Militer, dan banyak Perkantoran atau tempat Kerja sehingga merupakan wilayah padat penduduk sehingga sering terjadi masalah karena padat penduduk maka rentang terjadi penularan.⁷

Atas masalah diatas menjadi amat penting untuk dirumuskan terkait Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di Kelurahan Cawang Jakarta Timur Tahun 2020-2021 dalam penanggulangan pencegahan, penangan, pemulihan. Dalam penelitian ini merumuskan, Pertama terkait penanggulangan covid-19 di kelurahan cawang jakarta timur Tahun 2020-2021 tentang bagaimana bentuk implementasi kebijakan Covid-19 di Kelurahan Cawang kemudian kedua faktor- faktor penghambat dan pendukung dikelurahan cawang jakarta timur Tahun 2020-2021. Penulis memilih untuk mengangkat permasalahan ini lebih lanjut dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Cawang, Jakarta Timur Tahun 2022-2021” setelah merasa terinspirasi untuk mendalami lebih dalam melalui analisa yang mendalam, dengan memperhatikan sudut pandang yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. 2. Rumusan Masalah

Peraturan Pemerintah Daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Dises 2019 di Provinsi DKI Jakarta, 12 November 2020 yang lahir sebagai bentuk tanggung jawab serta bentuk kepedulian pemerintah untuk

⁷ [Cawang \(jakarta.go.id\)](http://Cawang.jakarta.go.id)

menanggulangi serta memutus mata rantai Covid-19 di ibukota Jakarta. Peraturan daerah ini mencakup berbagai topik. Misalnya, mewajibkan pengelola gedung di wilayah dengan mobilitas masyarakat untuk menyediakan fasilitas cuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti penggunaan masker bagi setiap individu dan membatasi aktivitas masyarakat dengan menjaga jarak antar orang setidaknya satu meter.⁸

Di wilayah yang diduga menjadi zona penularan COVID-19, PSBB merupakan langkah untuk melakukan banyak aktivitas masyarakat dengan tujuan mencegah penyebaran virus. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan PSBB tunduk pada dua syarat utama: pertama, terjadi peningkatan kasus atau kematian yang signifikan dan cepat menyebar di berbagai daerah; kedua, adanya hubungan epidemiologis dengan kasus serupa di area atau negara lain. Regulasi ini juga menegaskan bahwa pemerintah lokal memiliki wewenang untuk melaksanakan PSBB, dengan kepala daerah memainkan peran utama dalam mengatur dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan otoritas daerah otonom. Sebagai contoh, pada 9 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, menandai penerapan PSBB pertama kali pada 10 April, yang berlangsung selama dua minggu. Selama periode ini, akses ke fasilitas publik dibatasi, aktivitas pendidikan dan kerja beralih ke sistem online,

⁸ Fathoni, D.E. (2020). *Efektivitas penerapan Protokol Kesehatan di Masjid kelurahan Petukangan Utara* (kajian Normatif-Empiris dan Perspektif Hukum Islam pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019) (Bachelor's thesis, Fakultas Syarif Hidayatullah Jakarta).

transportasi umum dikurangi, dan hanya 11 sektor esensial yang diizinkan beroperasi. Penelitian saat ini memfokuskan implementasi kebijakan penanggulangan covid-19 tahun 2020-2021 apakah kebijakan yang dibuat di Tingkat Nasional dan DKI Jakarta perlu dikaji apakah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini kelurahan cawang.

Alasan peneliti memutuskan untuk memilih Kelurahan Cawang sebagai lokasi studi kasus dikarenakan kelurahan tersebut memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih besar di antara kelurahan lainnya. Kelurahan Cawang yang cukup luas, tidak menutup kemungkinan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jakarta Timur⁵.

1. 3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di kelurahan Cawang Jakarta Timur tahun 2020-2021 ?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat implementasi tersebut ?

1. 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan umum, sebagai berikut: ⁹

1. Untuk Untuk mengetahui implementasi kebijakan Penangulangan Covid -19 di Kelurahan Cawang
2. mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan Covid-19 di Kelurahan Cawang

⁹ Situmeang, T. (2020). Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSSB Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta.to-ra,2020,6.2:156-16. ejournaluki

1. 5. Signifikansi Penelitian

1. Untuk mengevaluasi kinerja Kelurahan Cawang dalam hal memberikan informasi penanggulangan covid dan menjadi bagian kajian untuk mematuhi peraturan pemerintah setempat.
2. Untuk mendorong masyarakat agar mematuhi peraturan Pemerintah.
3. Untuk menjadi satu literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga memberikan wawasan dalam berpikir dan menuangkan dalam tulisan.



1.6. Tabel Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini penulis melakukan penelusuran dan deskripsi mengenai hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Ada beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan (Novelty)
1.	Idham Imam Septura. Tahun 2020, jurnal dengan judul Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah daerah kabupaten Kerinci”	Menganalisis dampak dari penerapan kebijakan dalam meningkatkan keefektifan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.	Edward III mengenai Implementasi Kebijakan Publik.	Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif bersama dengan metodologi deskriptif. Dalam pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, formula validitas produk momen dan untuk menguji keandalan, digunakan formula Alpha Cronbach. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik korelasi dan regresi.	Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa: Pertama, keberhasilan strategi penanganan COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai berada pada tingkat menengah, dengan skor rata-rata dari respons partisipan mencapai 62.3%. Kedua, koefisien korelasi Pearson tercatat sebesar 0,859, menandakan adanya hubungan yang sangat erat dan bersifat positif antara variabel yang diteliti. Ketiga, nilai R-squared yang didapat adalah 0.738, menunjukkan bahwa variabel implementasi strategi memiliki pengaruh sebesar 73.8% terhadap variabel efektivitas strategi tersebut.	Mariska Clara Rumbrawer, Pada tahun 2022. Pada Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di Kelurahan Cawang Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2020-2021” untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Covid-19 di Kecamatan Cawang Jakarta Timur, Edward III, serta faktor pendorong dan penghambatnya pelaksanaan kebijakan Covid-19. penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana melakukan pengamatan secara langsung dan mengungkap kejadian atau
2.	Dian Herdiana, pada tahun	Subtansi yang ada sejalan dengan tatanan	Edward III mengenai Implementasi	Pendekatan dengan metode deskriptif. Pengumpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan AKB secara substansi merupakan	

2020. Pada jurnal dengan judul “Penanggulan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat”	normal sebagai pedoman dari Bdan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah merupakan konsep yang baru dan berbeda, secara empiris seperti apa isu dan peluang yang muncul ketika kebijakan AKB tersebut diimplementasikan..	Kebijakan Publik.	data diambil dari sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber relevan lainnya.	adopsi dari pedoman penyelenggaraan tatanan normal dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah, isu yang muncul secara empiris yaitu sejauhmana penerapan kebijakan AKB mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sejalan dengan penyelenggaraan aktivitas masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kedepannya yaitu mensinergikan kebijakan AKB di tingkat provinsi dengan kebijakan AKB di tingkat kota dan kabupaten, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-9 dan Kebijakan AKB.	fakta, keadaan, fenomena, variabel keadaan yang terjadi saat penelitian serta wawancara mendalam dan dokumentasi yang di ambil dari Lurah Cawang dan Kepala Puskesmas Cawang dan Masyarakat Cawang Jakarta Timur
3. Kiko Nurveiz Lamidja, dalam tahun 2018, menulis artikel di sebuah jurnal berjudul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu.	Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan kesehatan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu.	H. George Frederickson mengenai sudut pandang pelayanan Publik	Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana melakukan pengamatan secara langsung dan mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel keadaan yang terjadi saat penelitian serta wawancara mendalam dan dokumentasi yang di ambil di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kelurahan Cawang masih belum mematuhi protokol kesehatan dan untuk lansia tidak ingin untuk divaksinasi covid-19. Di karenakan sebagian warga belum mendapatkan informasi serta pelayanan cepat tanggap yang di lakukan oleh nakes belum maksimal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kelurahan Cawang masih belum mematuhi protokol kesehatan dan untuk lansia tidak ingin untuk divaksinasi covid-19. Di karenakan sebagian warga belum mendapatkan informasi serta pelayanan cepat tanggap yang di lakukan oleh nakes belum maksimal.

4.	Mariska Clara Rumbrawer, Pada tahun 2020-2021. Pada skripsi dengan Judul Implementasi Kebijakan Penanggulan gan Covid-19 Di Kelurahan cawang jakarta Timur 2020-2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 diKelurahan cawang jakarta timur, karena diketahui terdapat tiga tahap yaitu pencegahan,pena ngan, dan vaksinas i karena Cawang adalah wilayah padat penduduk dan banyak pendatang di wilayah Cawang	Edward III mengenai Implementasi Kebijakan Publik.	Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana melakukan pengamatan secara langsung dan mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel keadaan yang terjadi saat penelitian serta wawancara mendalam dan dokumentasi yang di ambil dari Ibu PKK dan Warga sekitar	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kelurahan Cawang merupakan wilayah padat penduduk dan cepat terjadi penyebaran Covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan demikian masyarakat Cawang Masih banyak yang menolak untuk divaksinasi covid-19. Di karenakan takut akan berita-berita dan hal buruk lainnya dan masyarakat membutuhkan bantuan sembako agar masyarakat ingin divaksinasi dan sebagian warga belum mendapatkan informasi serta pelayanan cepat tanggap yang di lakukan oleh nakes tidak maksimal	
----	--	---	--	--	---	--

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul “Implementasi Kebijakan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur Tahun 2020-2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penaggulangan COVID-19 Di kelurahan Cawang Jakarta Timur, karena diketahui terdapat tiga tahap yaitu pencegahan, penanganan karena Cawang adalah wilayah padat penduduk dan banyak pendatang di wilayah Cawang. Edward III mengenai Implementasi Kebijakan Publik.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana melakukan pengamatan secara langsung dan mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel keadaan yang terjadi saat penelitian serta wawancara mendalam dan dokumentasi yang di ambil dari bapak lurah Cawang, ibu Puskesmas Cawang dan Masyarakat serta RT/RW. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah ketiga penelitian terdahulu menggunakan undang-undang Covid-19 mengangkat covid-19 sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian terdahulu lebih mengangkat terkait pengaruh kebijakan Covid-19 sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih melihat ke pencegahan dan penanganan Covid-19 serta ketiga penelitian terdahulu lebih memiliki metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

1.7 Landasan Teori

1.7. 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat ditafsirkan sebagai konsep yang diperoleh dari istilah "*policy*" dalam bahasa Inggris. Secara umum, "*policy*" atau kebijakan memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai sebuah praktik sosial yang diciptakan oleh pemerintah berdasarkan situasi yang terjadi di dalam masyarakat dan dimanfaatkan untuk keuntungan masyarakat itu sendiri, serta sebagai suatu fenomena yang muncul dan digunakan untuk menciptakan keadaan damai. Menurut pandangan Lasswell dan Kaplan, yang dikutip oleh Sore dan Sobirin, kebijakan dianggap sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, menggambarkan strategi yang dirancang terkait dengan tujuan, nilai, dan praktik yang diinginkan.¹⁰

Menurut Chandier dan Piano dalam Haudi, kebijakan publik ialah penggunaan suatu program terdapat keadaan yang ada untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan pemerintahan¹⁰, hal tersebut untuk membantu para pelaksana kebijakan dalam pemecahan permasalahan yang ada. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan lembaga pemerintah, tempat pelaksanaan dan kebijakan¹¹.

¹⁰ Uddin. B. Sore, Sobirin, *Kebijakan Publik*, Makasar: CV Sah Media, 2017. Hal. 7

¹⁰ Haudi, *Kebijakan Publik*, Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021. Hal. 3

¹¹ Ibid., 4.

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan/mempunyai suatu tindakan dan yang orientasinya terletak pada tujuannya
2. Kebijakan meliputi tindakan pemerintah
3. Kebijakan ialah apa yang sungguh-sungguh diterapkan oleh pemerintah
4. Kebijakan yang digunakan memiliki sifat positif dalam artian *action* pemerintah
5. Kebijakan pemerintah dalam artian positif berdasarkan Undang Undang yang memiliki sifat mengikat dan memaksa

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan yang dirancang, sangatlah penting untuk melaksanakan kebijakan tersebut.¹² Implementasi kebijakan itu sendiri merupakan bagian terpenting dari proses kebijakan, oleh karena itu pemerintah sebagai pelaku implementasian sebuah kebijakan haruslah berpedoman dengan prosedur dan mekanisme serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan bahwa kebijakan, tidak peduli seberapa luas jangkauannya, pada hakikatnya adalah serangkaian tindakan berpola yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, dan bukan hanya keputusan spontan untuk bertindak. Sedangkan dijelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau metode bertindak yang sengaja dipilih untuk membimbing proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, Easton mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai proses di

¹² Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019. Hal 24.

mana pemerintah membagikan nilai-nilai kepada seluruh masyarakat, sehingga memungkinkan realisasi dari kebijakan tersebut. Kebijakan Publik Pengertian Kebijakan menurut Anderson menjelaskan sebagai berikut, “Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan Publik Menurut Sinambela publik yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang artinya umum, masyarakat, atau negara. Dalam konsep kebijakan publik, banyak pendapat yang memberikan makna berbeda-beda, tetapi konsep tersebut memberikan makna tentang kebijakan publik. Konsep tersebut justru memberikan penjelasan tentang kedalaman analisis guna merumuskan terkait batasan-batasan konsep kebijakan publik”. Penulis menjelaskan pendapat-pendapat para ahli tentang definisi kebijakan publik guna keperluan analisis dalam penulisan ini diantaranya adalah Robert Eyestone yang berpendapat bahwa secara luas kebijakan publik itu dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijaksanaan sebagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik yang ditentukan. Menurut mereka, kebijaksanaan merupakan sebuah rencana dengan target yang jelas untuk diwujudkan. Lebih lanjut, mereka mengartikan kebijakan publik sebagai metode untuk mencapai aspirasi bersama. Sebagai contoh, jika aspirasi bangsa Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik berfungsi sebagai alat dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks kebijakan publik, penting untuk memiliki tujuan atau sasaran yang spesifik yang ingin atau diharapkan untuk dicapai. Kebijakan publik sering kali diinterpretasikan atau dipahami sebagai sebuah tindakan politik, suatu pandangan yang sejalan dengan opini W.I. Jenkins. Jenkins menggambarkan kebijakan publik sebagai kumpulan keputusan yang saling terkait, diambil oleh aktor atau kelompok aktor politik, tentang pilihan tujuan dan metode pencapaiannya dalam suatu konteks dimana keputusan tersebut masih berada dalam ruang lingkup wewenang aktor tersebut.

Chief J.O. Udoji memberikan perspektif yang sedikit berbeda dari Jenkins, menekankan bahwa kebijakan publik bertujuan khusus dan berdampak pada masyarakat. Melalui berbagai definisi kebijakan publik yang diajukan oleh para ilmuwan, terlihat bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang luas dan dinamis, yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan. Kebijakan publik dirangkai sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, mencakup tahapan yang saling terkait dengan tujuan akhir yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis juga merujuk pada pandangan Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dengan tujuan khusus yang diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk

menyelesaikan masalah tertentu. Menurut Anderson, setiap kebijakan dirancang dengan tujuan khusus untuk mengatasi masalah tertentu dan tujuan tersebut dapat tercapai jika kebijakan diimplementasikan dengan efektif. Carl W. Patton dan David S. Savicky menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah proses yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan, baik itu kebijakan baru atau modifikasi dari kebijakan yang sudah ada.

1.7.2. Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III

Pelaksanaan kebijakan adalah langkah yang krusial dalam struktur keseluruhan dari kebijakan tersebut. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi pilihan.¹³

Sebagai instrumen utama dalam memusatkan perhatian terhadap penerapan kebijakan, penting untuk memahami realitas yang terjadi setelah suatu program diterapkan untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan efek yang diharapkan dan berhasil mencapai tujuan yang ditargetkan. Konsep ini menggarisbawahi penerapan kebijakan sebagai eksekusi dari strategi dasar, yang mungkin juga mengambil bentuk instruksi atau keputusan pengadilan. Dalam pengambilan keputusan ini, diidentifikasi

¹³ Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. 2015. Hal. 35

permasalahan yang perlu diatasi, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dituju, dan beragam strategi untuk mengorganisir proses penerapan tersebut.¹⁴

Prosedur ini melibatkan serangkaian langkah yang mencakup pembuatan kebijakan, persetujuan, dan pengesahan kebijakan tersebut, diikuti oleh pelaksanaannya oleh entitas pelaksana. Ini juga mencakup penerimaan implementasi keputusan oleh berbagai kelompok target, konsekuensi yang timbul dari implementasi tersebut—baik yang diinginkan maupun tidak, serta persepsi pengaruh keputusan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat perubahan pada kebijakan, undang-undang, atau regulasi yang relevan. Untuk melaksanakan kebijakan, diperlukan partisipasi yang lebih luas, termasuk sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Implementasi kebijakan merupakan proses interaktif yang terjadi selama formulasi kebijakan, dimana implementasi dianggap sebagai proses interaksi antara niat dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi lebih jauh dijelaskan sebagai bagian dari rangkaian sebab dan akibat yang mengaitkan tindakan dengan tujuan yang diharapkan. Melaksanakan kebijakan bukanlah tugas yang ringan, terutama dalam mencapai konsensus tujuan, dan seringkali menantang untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.

Mengimplementasikan kebijakan dalam praktik dan metode yang dapat memenuhi harapan semua pihak, termasuk penggunaanya, merupakan tantangan yang signifikan. Isu tambahan muncul ketika upaya memenuhi kebutuhan beragam grup

¹⁴ *Ibid.* Hal. 37

berpotensi menimbulkan konflik, yang kemudian dapat memicu evolusi dalam pemikiran politik terkait dengan konflik tersebut. Sabatier dan Mazmania, sebagaimana dikutip oleh Subianto, mengartikan implementasi kebijakan sebagai proses memahami apa yang akan terjadi setelah program diimplementasikan atau dirancang. Pemahaman ini mencakup usaha-usaha dalam pengelolaan administratif dan usaha-usaha untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Di sisi lain, Wahab menguraikan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk menghubungkan tujuan atau target kebijakan dengan realisasi hasil konkret dari aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah.

Goerge C. Edwards III telah merumuskan sebuah model implementasi kebijakan berdasarkan beberapa pendekatan terhadap studi implementasi Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan 4 variabel yang menjadi syarat penting dalam keberhasilan suatu proses implementasian. Ke-4 variabel tersebut adalah¹⁴:

1. Dalam perspektif Edward III seperti yang dipaparkan oleh Widodo, komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana seorang pengirim informasi berkomunikasi dengan penerima. Pentingnya mengkomunikasikan informasi tentang kebijakan publik, menurut Edward III, adalah agar semua yang terlibat dalam proses kebijakan, dari pembuat hingga pelaksana, mengerti tentang apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Edward III menekankan bahwa komunikasi kebijakan mencakup beberapa aspek penting seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Transmisi memastikan

informasi kebijakan sampai kepada semua pihak terkait, kejelasan memungkinkan pemahaman bersama tentang kebijakan, dan konsistensi menghindari kebingungan yang bisa mengganggu pelaksanaan kebijakan.

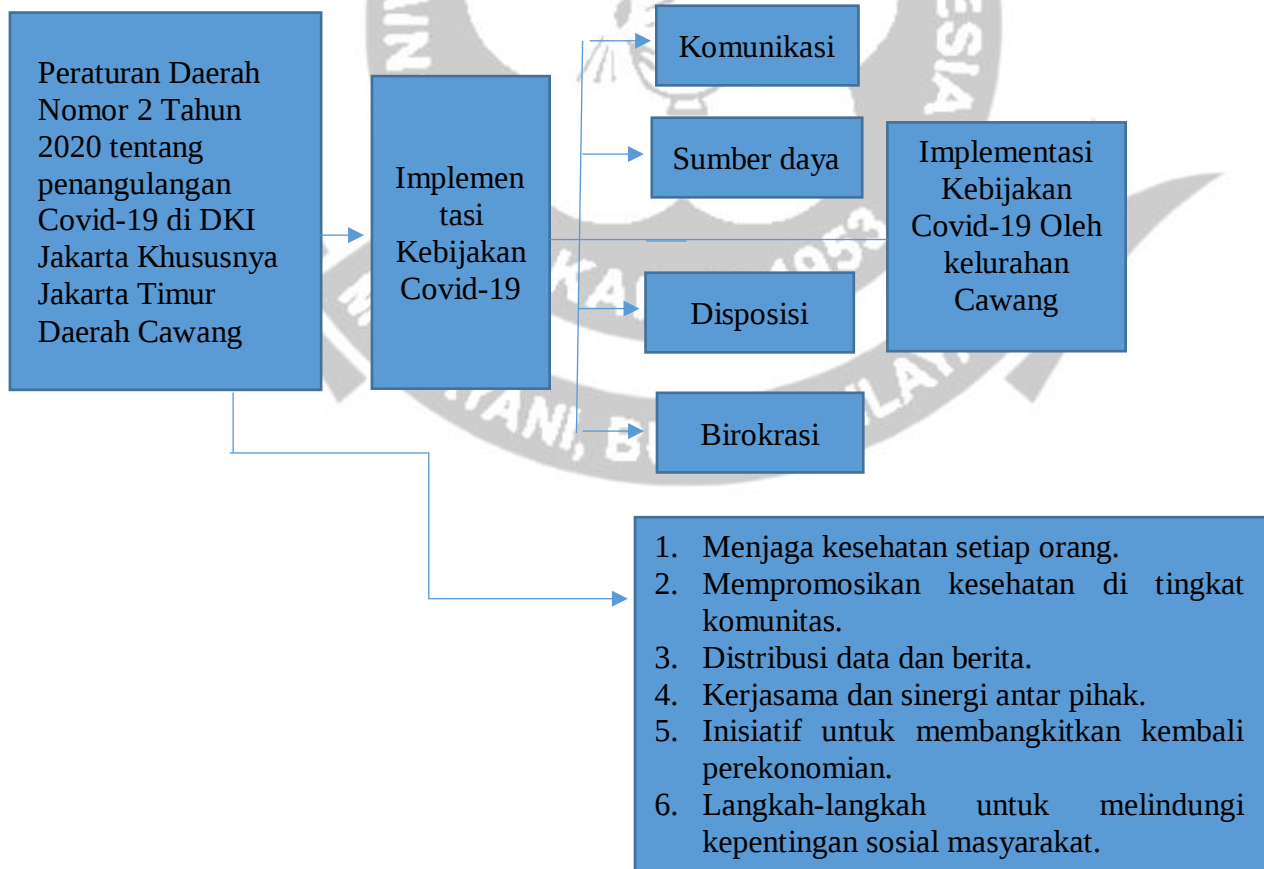
2. Edward III menyatakan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya ini berpengaruh signifikan terhadap suksesnya pelaksanaan kebijakan. Dalam hal sumber daya manusia, Edward III menyoroti hubungan antara ketersediaan sumber daya, kualitas pelayanan, dan motivasi pelaksana dalam menunjang keberhasilan kebijakan.
3. Mengenai disposisi, Edward III memandangnya sebagai kemauan dan motivasi pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan dengan serius, dengan tujuan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Disposisi ini menjadi faktor kritikal karena tanpa kemauan yang kuat dari pelaksana, kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien.
4. Dalam kaitannya dengan struktur birokrasi, Edward III dan penelitian oleh Ripley dan Franklin yang diulas oleh Winarno, mengidentifikasi karakteristik utama birokrasi dan bagaimana struktur ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, namun SOP dan fragmentasi bisa menjadi penghambat jika kebijakan memerlukan pendekatan atau personil baru. SOP yang kaku dapat

menghambat adaptasi terhadap kebijakan baru yang membutuhkan perubahan dalam prosedur standar atau cara kerja.

1. 8. Bagan Alur Pemikiran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 pada 12 November 2020 dengan tujuan untuk mengatasi wabah COVID-19. Peraturan yang ditetapkan Gubernur meliputi bidang-bidang berikut:

Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan melalui pemanfaatan metode penelitian yang akurat. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipilih sebagai kerangka kerja utama. Pendekatan ini diterapkan karena kemampuannya dalam menghasilkan informasi deskriptif yang berbentuk teks dari ucapan narasumber dan observasi terhadap perilaku yang nyata. Alasan pemilihan metode kualitatif ini berakar pada kompleksitas serta potensi dinamika dari isu yang sedang diujai, yang membutuhkan penggalian data secara mendalam melalui wawancara langsung. Dengan cara ini, informasi yang otentik dan natural dapat diperoleh langsung dari sumbernya. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana kebijakan Covid-19 diimplementasikan di kelurahan Cawang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses implementasi tersebut.

1.9.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif dan eksplanatif, di mana pendekatan eksplanatif bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor yang berperan di balik peristiwa tertentu, mengungkap sebab-sebab yang menyebabkan suatu fenomena muncul. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekedar menyajikan gambaran tentang suatu peristiwa, tetapi juga berupaya memverifikasi teori-teori

terkait dengan mengumpulkan data secara detail melalui penerapan metode deskriptif eksplanatif.¹⁵

Peneliti memanfaatkan metodologi tertentu untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan penerapan kebijakan Covid-19. Dalam prosesnya, teori-teori spesifik dikaji dan diterapkan secara deduktif untuk membentuk sebuah hipotesis yang berisikan variabel-variabel relevan, yang umumnya merupakan bagian dari studi eksploratif. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pencegahan, penanganan, dan vaksinasi Covid-19 di area Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selama periode tahun 2020 hingga 2021.

1.9. 3. Teknik Pengumpulan Data

1.9.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang terjadi antara dua individu atau lebih, dimana interaksi tersebut berlangsung antara seseorang yang memberikan informasi dan seseorang yang melakukan wawancara dengan tujuan untuk saling bertukar ide dan data melalui proses pertanyaan dan jawaban. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan responden hasil dari jawaban dari responden dilakukan secara di catat dan di rekam.

¹⁵ Surahman, dkk. *Metodologi penelitian*. Pusat pendidikan sumber daya manusia kesehatan Badan Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.2016. Hal. 10

Tabel 1.1. Daftar Informan

NO	NAMA	Tabel Daftar Informan
1	Didik Diarjo, SE, ME	Kepala Kelurahan Cawang
2	dr. Dwi Aminah	Kepala Puskesmas Cawang

1.9.3.2 Observasi

Peneliti mengaplikasikan teknik dalam mengumpulkan data yang berasal dari informasi faktual mengenai kenyataan yang dihadapi selama observasi. Penggunaan metode observasi ini bertujuan untuk mengamati serta mendeskripsikan secara detail bagaimana penerapan kebijakan penanganan covid-19 di wilayah Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selama periode tahun 2020 hingga 2021. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, peneliti melakukan observasi selama 3 bulan di kelurahan Cawang dan di Puskesmas Cawang dan di Masyarakat Cawang berserta pihak terkait Covid-19.

1.9.3.3 Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data sebagai penunjang data primer atau wawancara, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menganalisis buku, jurnal, media masa, internet, Undang Undang dan sebagainya. Peneliti beberapa dokumen seperti jurnal dll, selanjutnya juga menggunakan literatur buku-buku dengan tema Kebijakan Publik, hal

ini dilakukan untuk menggali informasi tambahan seperti teori-teori kebijakan publik, definisi, dan sistematika kebijakan.¹⁶

1.9.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peranan krusial dalam menetapkan keberhasilan suatu studi yang dilakukan. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan fakta sehingga berubah menjadi data, oleh karena itu, alat tersebut harus memiliki standar kualitas yang memadai, dalam hal ini valid, dengan kemampuan untuk mengumpulkan data yang merefleksikan kondisi atau realitas sebenarnya di lapangan.

¹⁶ Ibit, Hal.149

Tabel 1.2. Operasionalisasi Instrumen Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber
Implementasi Kebijakan Oleh George C. Edwards III	Komunikasi	Adanya kejelasan, Konsistensi dan pemahaman transmisi yang diterima	1. Bagaimana bentuk komunikasi pelaksana kebijakan penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Cawang? 2. Apa faktor hambatan dalam menyampaikan informasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di kelurahan cawang?	1. Bentuk komunikasi dari kelurahan ke masyarakat, dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman terkait peraturan penyebaran Covid-19 di kelurahan cawang, dan menyampaikan update terkini yang positif atau yang negatif Covid-19 maupun yang insoman (isolasi mandiri). kelurahan cawang memberikan informasi dalam bentuk memasang spanduk yang berisi tentang protokol kesehatan selama covid-19. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat karena adanya perbedaan cara padang, gangguan pada media yang digunakan seperti berita hoax, dan kurang kesadaran penyebaran covid-19 contohnya; masyarakat ada yang tidak mengikuti protokol yang di berikan oleh kementrian kesehatan.

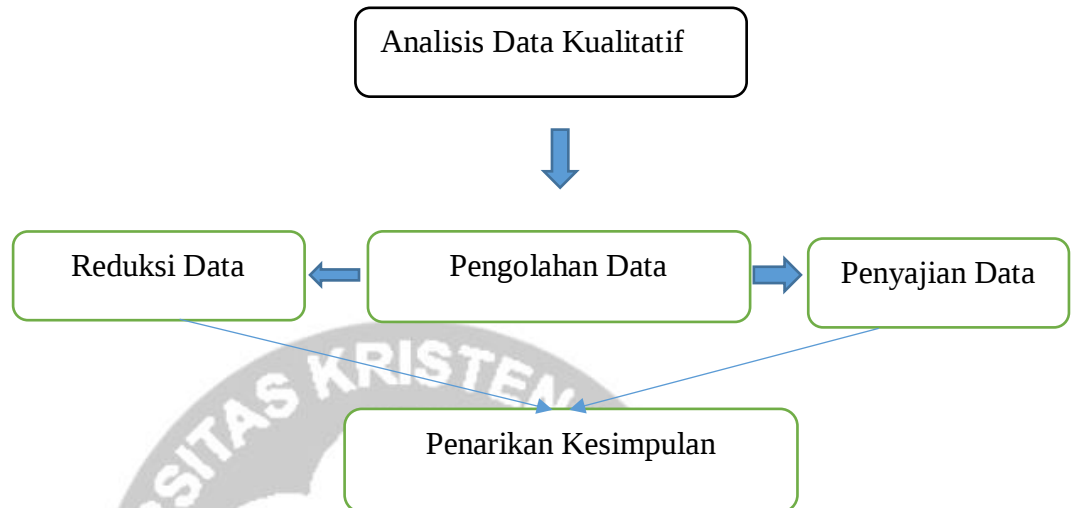
Sumber daya	Staf, Informasi, wewenang, Fasilitas	1. Siapa saja aktor menjadi pelaksana kebijakan COVID-19? 2. Apakah aktor yang melaksanakan kewenangan mampu mengimplementasikan kebijakan COVID-19? 3. Apakah fasilitas dalam penanganan COVID-19 yang dilakukan di kelurahan cawang telah terpenuhi?	1. Semua elemen di kelurahan cawang ikut terlibat, yaitu dari pokda, satpol PP, puskesmas ukdm semua unsur terlibat 2. Dari kelurahan sampai ke petugas satgas selalu memantau masyarakat cawang dengan cara keliling rumah-rumah warga. 3. Telah disediakan BPDB berupa masker, Hand Sanitizer ditempatkan umum di fasem-fasem masjid, sembako, dan tersedianya posko-posko di setiap RT/RW, masyarakat setempat juga turut mengikuti kebijakan pemerintah dengan membuat tempat cuci tangan.	1. Semua elemen di kelurahan cawang ikut terlibat, yaitu dari pokda, satpol PP, puskesmas ukdm semua unsur terlibat 2. Dari kelurahan sampai ke petugas satgas selalu memantau masyarakat cawang dengan cara keliling rumah-rumah warga. 3. Telah disediakan BPDB berupa masker, Hand Sanitizer ditempatkan umum di fasem-fasem masjid, sembako, dan tersedianya posko-posko di setiap RT/RW, masyarakat setempat juga turut mengikuti kebijakan pemerintah dengan membuat tempat cuci tangan.
	Disposisi	1. Apakah kebijakan penanganan covid-19 sangat relevan dan terealisasi? 2. Apa tanggapan aktor pelaksana kebijakan terhadap kebijakan pencegahan COVID-19 di Kelurahan Cawang?	1. Penyebaran lebih cepat tersebut tentunya memiliki banyak dampak dari berbagai aspek mulai dari pendidikan sampai aspek ekonomi yang membuat pemerintah harus membuat kebijakan yang efektif untuk mencegah dampak yang terjadi saat pandemi berlangsung. 2. Kepala kelurahan cawang merupakan satgas di kelurahan cawang dan memiliki tugas menyampaikan update yang terkena dan yang positif maupun negatif bagi masyarakat setempat baik yang isolasi mandiri .	1. Penyebaran lebih cepat tersebut tentunya memiliki banyak dampak dari berbagai aspek mulai dari pendidikan sampai aspek ekonomi yang membuat pemerintah harus membuat kebijakan yang efektif untuk mencegah dampak yang terjadi saat pandemi berlangsung. 2. Kepala kelurahan cawang merupakan satgas di kelurahan cawang dan memiliki tugas menyampaikan update yang terkena dan yang positif maupun negatif bagi masyarakat setempat baik yang isolasi mandiri .
	Struktur Birokasi	Standard Operational	1. Bagaimana implementasi kebijakan alur	1. Dari pihak kelurahan cawang melakukan upaya screening atas

		<i>Procedure</i> (SOP), dan Koordinasi	dalam pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Kelurahan Cawang? 2. Apakah pelaksanaan pencegahan COVID-19 telah terlaksana sesuai dengan SOP ? 3. Bagaimana koordinasi pelaksanaan untuk melakukan pencegahan terhadap kebijakan COVID-19 di Kelurahan Cawang?	proses keluar dan masuknya warga yang datang dari luar daerah, alur pencegahannya dari kelurahan cawang memberikan laporan dan rekomendasi kepada puskesmas kelurahan cawang. Contohnya bagi masyarakat yang mengalami suspek akan di tindak lanjuti dalam proses pengobatan dan isolasi mandiri. 2. Telah terlaksananya sesuai dengan SOP di setiap RT/RW, dan juga tersedia posko-posko Covid-19 di depan kantor kelurahan cawang 3. Proses pelaksanaan pencegahan covid-19 kelurahan cawang masyarakat juga turut ikut berpartisipasi dalam pencegahan covid-19.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III	Komunikasi	Faktor pendukung maupun penghambat dalam memenuhi kejelasan, Konsistensi dan pemahaman transmisi yang diterima	1. Apakah terdapat kesulitan yang menghambat pihak kelurahan Cawang dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Kelurahan Cawang? 2. Apakah terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan komunikasi untuk menyebarkan informasi kebijakan COVID-19?	1. Bagi kelurahan cawang dalam melakukan pencegahan tidak mengalami kesulitan ataupun hambatan di lapangan semua koperatif dan stakeholder dari warga yang terkena, baik pihak puskesmas juga ikut membantu. 2. faktor pendukungnya yaitu kerja sama dengan stakeholder semua jadi kita kelurahan Cawang itu guyuh baik dari warganya dari RT/RW nya lembaga pembantu di keluarahan seperti Lmk , Fkdm itu semua turun.

	Sumber Daya	Faktor pendukung dan penghambat Staf, Informasi, wewenang, Fasilitas	1. Apakah terdapat hambatan yang terjadi pada aktor implementor, dalam melaksanakan kebijakan COVID-19? 2. Apakah terdapat faktor pendorong yang tersedia bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan COVID-19?	1. Mengubah perilaku warga untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan tidaklah sederhana. Sebagian besar warga di kelurahan Cawang telah mematuhi protokol kesehatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Akan tetapi, ada sejumlah kecil dari mereka yang masih teridentifikasi kurang teliti dalam menjalankannya. 2. Ketersediaan informasi bagi masyarakat umum.
	Disposisi	Faktor pendukung dan penghambat dalam melihat kecenderungan terhadap implementasi kebijakan	1. Apakah tanggapan aktor dalam mengimplementasi kebijakan COVID-19 cenderung diterima dengan baik atau tidak?	1. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang telah di rumuskan dengan melibatkan komunitas-komunitas basis melalui gerakan pencegahan covid-19 agar dapat di terpakan masyarakat luas sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang telah dibuat . Hal tersebut di bantu dengan peran aktor-aktor lainnya seperti puskesmas, dinas kesehatan, komunitas lokal, mahasiswa UKI.
	Struktur Birokrasi	Faktor pendukung dan penghambat dalam <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP), dan Koordinasi	1. Apakah pedoman SOP dalam kebijakan menjadi faktor pendukung dalam penagulangan virus COVID-19? 2. Apakah terdapat hambatan dalam mengkoordinasikan kebijakan COVID-19?	1. Faktor pendukung lebih ke kerjasama pemerintah dan masyarakat kelurahan cawang. 2. Adanya faktor hambatan baik masyarakat yang rendahnya kesadaran dan terpengaruh informasi hoax dari media .

Pedoman Wawancara Mendalam merujuk pada dokumen ringkas yang memuat daftar informasi esensial untuk dikumpulkan dan pedoman pengumpulan data yang dikembangkan melalui proses operasionalisasi konsep teoretis. Dalam konteks Operasionalisasi Teoretis Instrumen Penelitian yang diusulkan oleh George C. Edward III, implementasi kebijakan dilihat sebagai proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Edward III membuka diskusi dengan dua pertanyaan kritis, yaitu: Apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? dan Apa hambatan utama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan?. Dalam usahanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, George C. Edward III mengkaji empat elemen atau variabel penting dalam kebijakan—organisasi birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi dalam upaya mengatasi permasalahan ini.

1.9. 6. Teknik Analisa Data



Dengan menggunakan alat analisis data, peneliti dapat lebih mudah memperoleh kesimpulan dengan mengumpulkan data secara metodis. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data memerlukan komunikasi berkelanjutan. Proses ini mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi¹⁷. Namun, peneliti harus dapat memisahkan data deskriptif (sebagaimana adanya) dari data yang akan interpretasikan setelah di analisis.

¹⁷ Mey Harianti, *Analisa Data Kualitatif Miles dan Hubermen*, 2015

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Tinjauan Literatur, Dasar Teoritis atau Konseptual, Diagram Alur Berpikir, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Objek Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran umum kebijakan Penanggulangan Covid Peraturan, gambaran ini akan mengenai tujuan faktor pembuatan kebijakan penanggulangan, isi dalam kebijakan dan seterusnya

BAB III Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di kelurahan Cawang Jakarta Timur Perda DKI Jakarta

Di dalam bab ini peneliti akan menjelaskan implementasi kebijakan covid19 di kelurahan Cawang Jakarta Timur tahun 2020-2021. Menjelaskan tentang terkait lahirnya covid-19, struktur umum organisasi yaitu kepengurusan di kelurahan Cawang kecamatan, kramat Jati Jakarta Timur.

BAB IV Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan Covid19 di kelurahan Cawang Jakarta Timur

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu faktor penghambat dan pendukung Implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di kelurahan Cawang Tahun 2020-2021 melalui perspektif metode implementasi kebijakan.

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan rangkuman dan rekomendasi yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, temuan penelitian, serta jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Di dalamnya terdapat saran-saran yang bermanfaat dan mendukung untuk penyusunan hasil penelitian, meliputi Kesimpulan, Jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan kebaruan temuan dari proses analisis. Saran yang terdapat di sini mencakup hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian.

